

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan peran kepolisian Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum yang humanis. Artikel ini menyoroti hambatan struktural, kultural, dan teknis, termasuk ineffisiensi dalam birokrasi, pendekatan kepemimpinan yang ketinggalan zaman, dan adopsi teknologi modern yang tidak memadai. Masalah-masalah ini menghambat kepolisian yang efektif dan mengurangi kepercayaan publik. Artikel ini juga menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan praktik penegakan hukum dengan konteks budaya spesifik masyarakat, seperti menangani praktik penyelesaian konflik tradisional seperti carok di Madura, dengan menggunakan pendekatan humanis dan dialogis. Untuk menjembatani kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas di lapangan, artikel ini mengusulkan strategi yang komprehensif. Ini termasuk pengembangan kapasitas melalui pelatihan humanis, menekankan empati dan pemahaman budaya, mereformasi proses rekrutmen, dan memanfaatkan teknologi untuk transparansi. Implementasi model pemolisian masyarakat, seperti Polmas, disorot sebagai cara praktis untuk mendorong kolaborasi antara polisi dan masyarakat. Studi ini menggunakan kombinasi pendekatan normatif dan sosiologis, dengan memanfaatkan undang-undang, observasi langsung, dan wawancara dengan praktisi polisi. Dengan memadukan pedoman etika, pelatihan berkelanjutan, dan kebijakan yang berpusat pada masyarakat, artikel ini menganjurkan kerangka kerja kepolisian transformatif yang menegakkan keadilan, menghormati keberagaman budaya, dan memperkuat kepercayaan publik. Kerangka kerja ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila Indonesia, yang menekankan keadilan dan martabat manusia dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Humanis, Kepolisian Indonesia (Polri), Polmas (Pemolisian Masyarakat), Kepercayaan Publik